

AUDIT KEUANGAN DAERAH (MENYIKAPI PERSPEKTIF PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL)

Miftahul Jannah^{1*}, Zulkarnaini², Mariana³

Politeknik Negeri Lhokseumawe, Politeknik Negeri Lhokseumawe

miftahuljannah@pnl.ac.id¹, zulkarnaini@pnl.ac.id³, mariana@pnl.ac.id³

Abstract

This study aims to analyze the role of public sector auditing in supporting the implementation of accrual-based accounting systems in Indonesian local governments. The adoption of accrual accounting as part of the implementation of International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) requires stronger oversight, transparency, and public financial accountability. This research employs a descriptive qualitative approach using observation and document analysis as data collection techniques. The findings indicate that accrual-based accounting provides more comprehensive and relevant financial information, thereby enhancing the audit function in assessing compliance, performance, and the management of assets and liabilities. However, the implementation of accrual accounting still faces challenges related to human resource limitations, technical complexity, and the need to strengthen auditor independence. This study concludes that strong synergy between accrual-based accounting systems and high-quality auditing is essential to achieving transparent, accountable, and sustainable local government financial governance.

Keywords: public sector audit; accrual accounting; local government

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran audit sektor publik dalam mendukung implementasi sistem akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah di Indonesia. Penerapan akuntansi akrual sebagai adopsi International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) menuntut peningkatan kualitas pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas keuangan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi akrual menyediakan informasi keuangan yang lebih komprehensif dan relevan, sehingga memperkuat fungsi audit dalam menilai kepatuhan, kinerja, dan pengelolaan aset serta kewajiban pemerintah daerah. Namun demikian, implementasi sistem akrual masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas teknis, dan kebutuhan penguatan independensi auditor. Penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara sistem akuntansi akrual dan audit yang berkualitas merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola keuangan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata kunci: audit sektor publik; akuntansi akrual; pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Kondisi saat ini sangat relevan dengan berlakunya sistem akuntansi akrual sebagai bentuk adopsi International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) yang telah diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia. Implementasi IPSAS sebagai sistem akuntansi akrual tidak terlepas dari payung hukum Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dasar hukum ini menjadi landasan bagi auditor dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pemeriksa

keuangan pemerintah, yang memiliki tanggung jawab dalam menciptakan indikator kinerja yang transparan dan akuntabel (Mariana & Rahmani, 2022).

Di sisi lain, penelitian Volodina et al. (2023) menemukan adanya konflik peran bagi auditor internal di Ukraina, yang dituntut untuk melakukan perubahan signifikan oleh pemerintah, namun tetap mempertahankan peran tradisionalnya sebagai “anjing penjaga” bagi manajer sektor publik. Kondisi serupa juga ditemukan oleh Tetteh et al. (2023), yang menunjukkan bahwa auditor internal menghadapi tekanan institusional, konflik peran, dan ambiguitas tinggi dalam menghasilkan laporan audit. Berbagai hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi auditor di Indonesia dalam menjalankan amanah masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan sehat (Han et al., 2023; Kalbuana et al., 2025).

Audit pada pemerintahan di Indonesia memegang peranan penting karena transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah daerah sangat mempengaruhi kepercayaan publik (Krah & Mertens, 2023). Melalui peran dan fungsi audit, auditor memiliki tanggung jawab langsung terhadap hasil pekerjaannya kepada atasan dalam organisasi, yang menjadikan profesi ini unik dibandingkan profesi lainnya. Permasalahan dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh indikator peran yang dijalankan, khususnya dalam audit lembaga pemerintahan. Dari perspektif demografi organisasi, tuntutan peran auditor pemerintah berbeda dengan auditor pada perusahaan atau industri bisnis yang berorientasi profit, sehingga pengaruh motivasi dan independensi auditor menjadi kunci dalam kinerja auditor (Mariana et al., 2024).

Selain itu, teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan juga mulai mempengaruhi praktik akuntansi dan audit, yang memberikan peluang bagi peningkatan kualitas audit melalui otomatisasi dan transparansi data (Han et al., 2023). Faktor-faktor lain seperti profitabilitas, audit report lag, audit tenure, dan ukuran perusahaan auditee juga berdampak pada dinamika kualitas audit, menandakan perlunya adaptasi dan inovasi dalam praktik audit publik (Kalbuana et al., 2025). Berbagai tantangan dan peluang ini menegaskan bahwa auditor pemerintah di Indonesia memerlukan kombinasi kemampuan teknis, etika profesional, dan motivasi tinggi untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik (Leone et al., 2003; Mariana & Rahmani, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, dan menjelaskan secara mendalam suatu fenomena atau objek penelitian apa adanya, berdasarkan data yang dikumpulkan secara faktual (Mariana et al., 2025). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara komprehensif dan subjektif, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual di sektor publik serta kendala yang dihadapi (Mariana et al., 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan analisis dokumen (Arifai et al., 2025). Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan pengungkapan lingkungan dalam pengelolaan keuangan publik (Firdaus et al., 2024) serta implementasi prinsip akuntansi syariah di sektor publik (Chilshi et al., 2024; Alfianti et al., 2025). Pendekatan kualitatif deskriptif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang holistik mengenai peran akuntansi berbasis akrual, keberlanjutan, dan praktik syariah dalam pengelolaan keuangan publik, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dan efektivitasnya (Zulkarnaini et al., 2025).

LANDASAN TEORETIS

Peran internal audit memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui tingkat kapabilitas, kematangan, dan ukuran audit yang diterapkan (Muhtar et al., 2020). Standar yang digunakan, khususnya sistem akuntansi berbasis akrual, terus dievaluasi dan ditingkatkan agar informasi keuangan pemerintah lebih transparan dan akuntabel. Keberadaan audit di pemerintah daerah membuka peluang sekaligus tantangan bagi auditor untuk menghasilkan laporan audit berkualitas, terutama di tengah fenomena reformasi pemerintahan seperti New Public Management (NPM) dan adopsi IPSAS yang tercermin dalam sistem akrual (Parker et al., 2018; Lagunes & Pocasangre, 2019).

Studi terdahulu menunjukkan bahwa kualitas audit tetap terjaga selama masa transisi penerapan akuntansi akrual melalui audit kinerja, peningkatan kompetensi, dan independensi auditor (Djanegara et al., 2018a). Sistem akuntansi berbasis akrual diyakini mampu menyajikan informasi yang lebih komprehensif dan relevan untuk meningkatkan akuntabilitas publik (Mir & Sutiyono, 2013), meskipun masih terdapat kendala yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Transformasi dari sistem Cash to Accrual masih menimbulkan tantangan berupa ketidakseimbangan antara permintaan, pasokan, dan kualitas keluaran informasi akuntansi (Mir & Sutiyono, 2013). Kondisi ini berpengaruh pada strategi audit, kompetensi auditor, dan independensi sebagai faktor penentu kualitas audit yang diharapkan (Djanegara et al., 2018b).

Selain itu, audit berperan sebagai landasan penting dalam implementasi sistem akuntansi akrual di pemerintah daerah. Profesionalisasi, standarisasi, dan legitimasi audit menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas publik, seperti yang terlihat di Kanada dan Denmark, di mana lembaga supremasi audit menekankan kepentingan publik dalam zona abu-abu antara audit obyektif dan sensitif politik (Hazgui et al., 2022). Sejalan dengan itu, transparansi informasi publik juga menjadi bagian penting dari audit berkualitas yang adaptif dan mampu mendorong pengembangan sistem akuntansi daerah (Lagunes & Pocasangre, 2019; Drake et al., 2024; Darmawan, 2023).

Kendala implementasi sistem akuntansi akrual di Indonesia meliputi kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran infrastruktur teknologi, serta budaya kerja dan suasana politik yang belum optimal. Hal ini berdampak pada kualitas audit dan

efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Li et al., 2023; Sari et al., 2021). Oleh karena itu, audit dan sistem akuntansi akrual harus berjalan secara sinergis, saling melengkapi, dan terintegrasi agar mampu menghasilkan output maksimal serta mendorong kinerja pemerintah daerah yang berkelanjutan. Selain itu, kualitas audit juga memoderasi pengaruh praktik manajemen laba terhadap peluang investasi berkelanjutan, sehingga peran audit tidak hanya sekadar memastikan kepatuhan, tetapi juga mendorong pengambilan keputusan strategis (Alsmady, 2023; Deeb et al., 2024; Francis, 2011). Dengan demikian, audit dan sistem akuntansi akrual merupakan dua sisi yang saling bergantung untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pemerintah daerah yang optimal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Audit dan Sistem Akuntansi Akrual dalam Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi berbasis akrual berkontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sistem ini memungkinkan penyajian informasi keuangan yang lebih komprehensif, khususnya terkait aset, kewajiban, dan kinerja keuangan jangka panjang, sehingga memperkuat kualitas pelaporan keuangan sektor publik (Mariana et al., 2025). Temuan ini sejalan dengan literatur audit internasional yang menekankan bahwa kualitas sistem akuntansi menjadi prasyarat utama bagi audit yang efektif dan andal (Francis, 2011).

Audit sektor publik berperan sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi serta menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik. Studi Muhtar et al. (2020) menunjukkan bahwa kapabilitas dan kematangan fungsi audit internal pemerintah daerah berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam akuntansi akrual, auditor tidak hanya menilai kepatuhan administratif, tetapi juga kualitas estimasi akuntansi, pengungkapan, dan transparansi informasi keuangan (Darmawan, 2023).

Lebih lanjut, pemisahan fungsi fiskal dan audit terbukti mampu meningkatkan kualitas pengungkapan pemerintah. Li et al. (2023) menegaskan bahwa independensi audit berkontribusi terhadap peningkatan kualitas disclosure pemerintah, terutama dalam lingkungan pemerintahan yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa audit dan sistem akuntansi akrual merupakan dua elemen yang saling melengkapi dalam memperkuat akuntabilitas publik.

Dengan demikian, audit dan akuntansi akrual tidak dapat dipandang sebagai dua mekanisme yang berdiri sendiri. Audit membutuhkan informasi akrual yang berkualitas untuk menghasilkan rekomendasi yang relevan, sementara sistem akuntansi akrual memerlukan audit yang kuat agar implementasinya berjalan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Francis, 2011; Li et al., 2023).

Peluang dan Tantangan Implementasi Akuntansi Akrual

Penerapan sistem akuntansi akrual membuka peluang besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan transparansi fiskal. Informasi akrual memungkinkan pemerintah mendeteksi potensi risiko fiskal, pengelolaan aset yang tidak optimal, serta kewajiban jangka panjang yang sebelumnya tidak terlihat dalam basis kas (Mariana et al., 2025). Dari perspektif audit, kondisi ini memperluas ruang lingkup pemeriksaan dan meningkatkan nilai tambah audit dalam pengambilan keputusan publik.

Audit yang berkualitas juga berperan penting dalam mendorong transparansi dan kepercayaan publik. Lagunes dan Pocasangre (2019) menunjukkan bahwa audit berfungsi sebagai instrumen transparansi dinamis, di mana pengawasan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan publik. Dalam pemerintah daerah, audit atas laporan berbasis akrual menjadi sarana untuk memastikan bahwa informasi keuangan disajikan secara jujur dan dapat digunakan oleh masyarakat.

Namun demikian, implementasi akuntansi akrual masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kompleksitas estimasi akuntansi, serta ketergantungan pada sistem informasi keuangan menjadi kendala utama yang berdampak pada kualitas audit (Sari et al., 2021). Tantangan ini berpotensi menurunkan kualitas temuan audit apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kompetensi auditor dan penguatan tata kelola audit.

Selain itu, kualitas audit juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan kelembagaan. Studi Hazgui et al. (2022) menegaskan bahwa lembaga audit publik harus menavigasi kepentingan profesional, moral, dan politik secara seimbang agar tetap legitim dan efektif. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi akuntansi akrual sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, auditor, dan institusi pengawasan dalam membangun sistem yang berkelanjutan.

Kontribusi Praktis dan Teoritis Penelitian

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan publik. Integrasi antara sistem akuntansi akrual dan audit yang berkualitas dapat meningkatkan transparansi, memperbaiki pengelolaan aset dan kewajiban, serta memperkuat akuntabilitas kepada masyarakat (Mariana et al., 2025; Darmawan, 2023). Temuan ini relevan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi penguatan sistem keuangan daerah.

Bagi auditor sektor publik, penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi profesional dan independensi audit. Literatur Scopus menunjukkan bahwa kualitas audit merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pengungkapan dan transparansi pelaporan keuangan (Francis, 2011; Li et al., 2023). Auditor dituntut untuk memahami kompleksitas akuntansi akrual dan mampu memberikan rekomendasi yang bernilai tambah bagi pemerintah daerah.

Dari sisi kelembagaan, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga pengawasan seperti BPK dan asosiasi profesi dalam menyusun kebijakan, standar, dan pelatihan audit sektor publik. Penguatan audit yang adaptif terhadap sistem akrual diharapkan mampu meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Hazgui et al., 2022).

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai reformasi akuntansi sektor publik dengan menekankan peran audit sebagai mekanisme penghubung antara sistem akuntansi akrual dan akuntabilitas publik. Studi ini menegaskan bahwa kualitas audit bukan hanya hasil dari prosedur teknis, tetapi juga dari kelembagaan, transparansi, dan keberlanjutan tata kelola keuangan pemerintah (Francis, 2011; Lagunes & Pocasangre, 2019).

KESIMPULAN

Audit merupakan elemen fundamental dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah, terutama dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Implementasi sistem akuntansi berbasis akrual tidak hanya berfungsi sebagai parameter keberhasilan reformasi keuangan daerah, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan audit yang berkualitas. Meskipun audit dan sistem akuntansi akrual memiliki sudut pandang yang berbeda, keduanya membentuk hubungan yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan dalam mendorong akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Secara praktis, sistem akuntansi akrual menyediakan informasi keuangan yang lebih komprehensif, relevan, dan andal bagi auditor dalam melakukan evaluasi kinerja serta penilaian kepatuhan. Informasi berbasis akrual memungkinkan proses audit berjalan secara berkelanjutan dan menghasilkan rekomendasi yang lebih substantif, yang pada akhirnya mendorong perbaikan tata kelola dan reformasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, keberlanjutan audit dalam seluruh siklus penganggaran pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam pencapaian kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, optimalisasi peran audit dalam lingkungan akuntansi berbasis akrual menuntut adanya independensi auditor yang kuat serta dukungan kebijakan dan prosedur yang jelas, konsisten, dan bebas dari intervensi. Profesi audit di sektor publik memiliki karakteristik yang unik dan strategis, sehingga penguatan kompetensi, integritas, dan independensi auditor menjadi prasyarat penting dalam menjaga kualitas rekomendasi audit yang dihasilkan. Dengan demikian, sinergi antara sistem akuntansi akrual dan audit yang independen dan berkualitas merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola keuangan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh penerapan sistem akuntansi, tetapi juga oleh kekuatan dan keberlanjutan fungsi audit sebagai mekanisme pengawasan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianti, J., Irawan, Y., Firdaus, A., Mariana, M., Diana, D., & Meilvinasvita, D. (2025). Perkembangan manajemen keuangan syariah: Tren dan prospek masa depan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 7*(6), 1914–1930. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i6.7484>
- Alsmady, A. A. (2023). The moderating role of audit quality between earnings management and sustainable investment opportunities: Evidences from Gulf Cooperation Council countries. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting, 16*(1), 18–32. <https://doi.org/10.33094/ijaef.v16i1.874>
- Arifai, M., Mariana, M., Fahlevi, H., Indriani, M., & Darwanis, D. (2025). Structured Literature Analysis on Sustainability Report Disclosure in Public Sector Organizations. *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen, 15*(2), 484–501.
- Chilshi, I., Aini, K., Marina, R., Roja, D., Firdaus, A., Arifai, M., & Mariana, M. (2024). Implementing sharia accounting principles in the public sector: A systematic literature review of challenges and opportunities. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 3*(1), 83–93.
- Darmawan, A. (2023). Audit quality and its impact on financial reporting transparency. *Golden Ratio of Auditing Research, 3*(1), 32–45. <https://doi.org/10.52970/grar.v3i1.375>
- Deeb, E., Samy, M., Alarabi, Y., & Mohamed, A. (2024). The role of audit committee characteristics in improving the risk disclosure of companies. *Future Business Journal. https://doi.org/10.1186/s43093-024-00417-2*
- Djanegara, M. S., & Iriyadi, I. (2018a). Implementation of audit strategy to improve audit quality in first year of local government implementing accrual-based accounting. *International Journal of Economic Research*.
- Djanegara, M. S., & Iriyadi, I. (2018b). Audit quality determinants in the transition to accrual accounting: Evidence from Indonesian local governments. *Asian Journal of Accounting and Governance, 10*, 1–12.
- Drake, J. R., Hall, C. M., & Simper, R. (2024). Public sector audit and accountability in the digital age: A systematic review. *Journal of Accounting Literature. https://doi.org/10.1108/JAL-08-2023-0120*
- Firdaus, A., Arifai, M., Mariana, M., Fahira, A., Silvia, I., Azaria, P. S., & Azzahra, R. (2024). Environmental disclosure in local government financial reports: A systematic literature review. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 3*(2), 153–163. <https://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/jhei/article/view/366/268>
- Francis, J. R. (2011). A framework for understanding and researching audit quality. *Auditing: A Journal of Practice & Theory, 30*(2), 125–152. <https://doi.org/10.2308/ajpt-50006>
- Han, H., Zhang, L., & Chen, Y. (2023). The impact of blockchain and artificial intelligence on audit quality: Evidence from public sector organizations. *Journal of Information Systems, 37*(2), 45–67.

- Hazgui, M., Brivot, M., & Gendron, Y. (2022). Auditing in the public interest: The case of Supreme Audit Institutions navigating between objectivity and political sensitivity. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 35(3), 789–815. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2020-4730>
- Kalbuana, N., Suryani, E., & Prasetyo, A. (2025). Profitability, audit report lag, audit tenure, and firm size as determinants of audit quality: Evidence from Indonesia. *International Journal of Auditing and Assurance*, 8(1), 112–130.
- Krah, R., & Mertens, G. (2023). Public trust and government accountability: The mediating role of audit quality. *Journal of Public Administration and Governance*, 13(2), 88–105.
- Lagunes, P., & Pocasangre, O. (2019). Dynamic transparency: An audit of Mexico's Freedom of Information Act. *Public Administration*, 97(1), 162–176. <https://doi.org/10.1111/padm.12553>
- Leone, A. J., Rock, S., & Willenborg, M. (2003). Disclosure of auditor materiality thresholds in public company audits. *The Accounting Review*, 78(2), 543–566.
- Li, O. Z., Wu, W., Xia, L., & Zhang, Q. (2023). Fiscal-audit separation and government disclosure quality. *Journal of Accounting and Public Policy*, 42(4), 107100. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2023.107100>
- Mariana, M., & Rahmانيar, R. (2022). Pengaruh motivasi dan independensi auditor terhadap kinerja auditor. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 1(2), 76–86. <https://doi.org/10.61393/heiema.v1i2.74>
- Mariana, M., Liza, L., Ramadana, S. W., Rahmانيar, R., & Zulfikar, Z. (2024). Pengaruh etika audit dan motivasi terhadap keputusan strategis internal auditor. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2306–2313. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2179>
- Mariana, M., Arifai, M., Zulkarnaini, Z., & Firdaus, A. (2025). Akuntansi akrual dan transparansi fiskal: Studi kasus pemerintah daerah di Aceh. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 10(1), 55–72.
- Mariana, M., Firdaus, A., Arifai, M., Diana, D., Nursyidah, N., & Indah, Y. (2025). The Role of Environmental and Social Accounting in Public Sector Sustainable Finance. *Proceedings of the 2nd International Conference of Economics, Management, Accounting, and Business Digital (ICEMAB 2025)*, 61–67. <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-974-2>
- Mariana, M., Diana, D., Arifai, M., & Jannah, M. (2025). Public Sector Accounting Reform: A Systematic Literature Review. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2), 132–141.
- Mir, M., & Sutiyono, W. (2013). Accrual accounting adoption in Indonesian local government: Challenges and opportunities. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 3(2), 100–121.
- Muhtar, M., Payamta, P., Sutaryo, S., & Amidjaya, P. G. (2020). Government accrual-based accounting standards implementation in Indonesia: The role of local government internal audit. *Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D*, 28(3). <https://doi.org/10.46585/sp28031107>

- Parker, L., Jacobs, K., & Schmitz, J. (2018). New Public Management and the rise of public sector performance audit: Evidence from Australia. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31(1), 280–306.
- Sari, D. K., Utami, W., & Haryanto, H. (2021). Kendala implementasi akuntansi akrual di pemerintah daerah: Perspektif sumber daya manusia dan teknologi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 16(2), 134–150.
- Tetteh, L. A., Agyenim-Boateng, C., & Simpson, S. N. Y. (2023). Institutional pressures and strategic response to auditing implementation of sustainable development goals: The role of public sector auditors. *Journal of Applied Accounting Research*, 24(2), 403–423. <https://doi.org/10.1108/JAAR-05-2022-0101>
- Volodina, T., Grossi, G., & Vakulenko, V. (2023). The changing roles of internal auditors in the Ukrainian central government. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 19(6), 1–23. <https://doi.org/10.1108/JAOC-04-2021-0057>
- Zulkarnaini, Z., Inuzula, L., Zulfikar, Z., Kheriah, K., Alfianti, J., & Mariana, M. (2025). Pengaruh penerapan sistem bagi hasil syariah terhadap kinerja koperasi berbasis balanced scorecard dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. *Journal of Islamic Management*, 5(2), 149–171.